

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu pembangunan disebuah negara akan dianggap berhasil apabila dapat menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan ekonomi. Dan pembangunan juga merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan juga didefinisikan sebagai suatu proses untuk mencapai perubahan yang lebih besar (Arsyad, 2010). Semua negara menginginkan adanya peningkatan standar hidup bagi setiap masyarakatnya dari segala lapisan, dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki, kemudian menyusun rencana-rencana pembangunan dan melaksanakannya melalui partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga tercapainya tingkatkesejahteraan yang lebih baik lagi bagi masyarakat.

Menurut Suryana (2000) terdapat beberapa model dari pembangunan :

1. Pembangunan Ekonomi yang berkiblat pada pertumbuhan.
2. Menciptakan pekerjaan.
3. Menghapus kemiskinan.
4. Pembangunan ekonomi yang berfikir pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Pertumbuhan ekonomi seringkali diikuti dengan perubahan struktur pendapatan, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Masalah yang biasa dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang adalah masalah mengenai

kesenjangan ekonomi ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah.

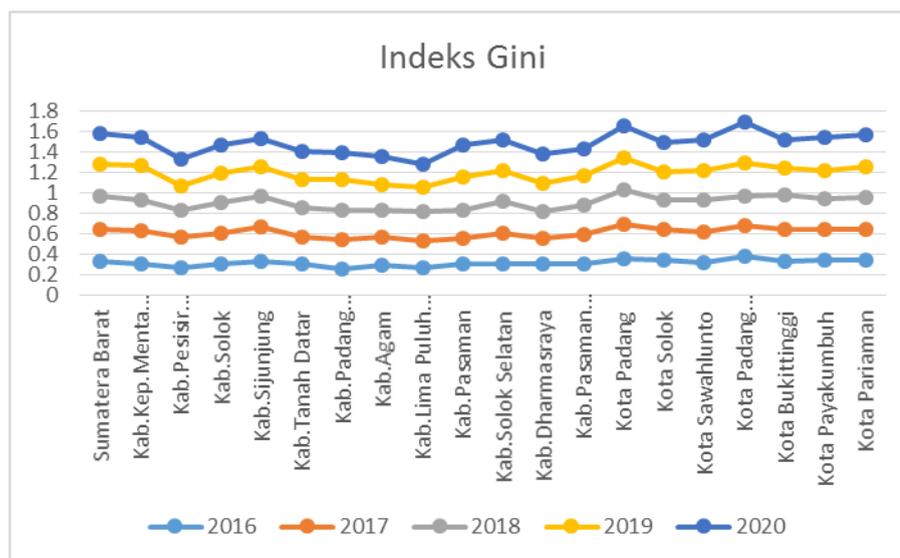
Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, pertumbuhan ekonomi ialah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmurann masyarakat meningkat. (Sukirno, 2011 : 331)

Pembangunan ekonomi tidak hanya mengenai tentang pertumbuhan PDB , penyediaan lapangan kerja, pengentasan masalah kemiskinan, namun juga menanggulangi adanya permasalahan ketimpangan pendapatan antar daerah disuatu negara (Tadoro, 2000). Di Indonesia adanya masalah ketimpangan pendapatan ada di wilayah daerah yang ada di Indonesia. Dengan adanya ketimpangan pendapatan di suatu wilayah tertentu memperlihatkan belum meratanya pembangunan ekonomi di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, hal ini tentu menjadi salah satu tugas bagi pemerintah untuk mencari solusi tentang bagaimana menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan tersebut.

Ketimpangan pendapatan diartikan sebagai adanya perbedaan pendapatan yang di dapat anantara daerah satu dengan daerah yang lain atau perbedaan pendapatan antara individu satu dengan individu yang lain di suatu daerah atau wilayah yang sama. Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat dikurangi sampai dengan tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terjaga dalam proses pertumbuhannya.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di masing-masing daerah akan menyebabkan kecemburuan sosial antara golongan orang-orang yang memiliki pendapatan rendah dengan golongan orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan di suatu daerah, salah satu contohnya adalah ketimpangan terjadi karena adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan kemiskinan.

Tabel 1.1
Indeks Gini di Provinsi Sumatera Barat
menurut Kab/Kota 2016-2020



(Sumber : BPS Sumatera Barat)

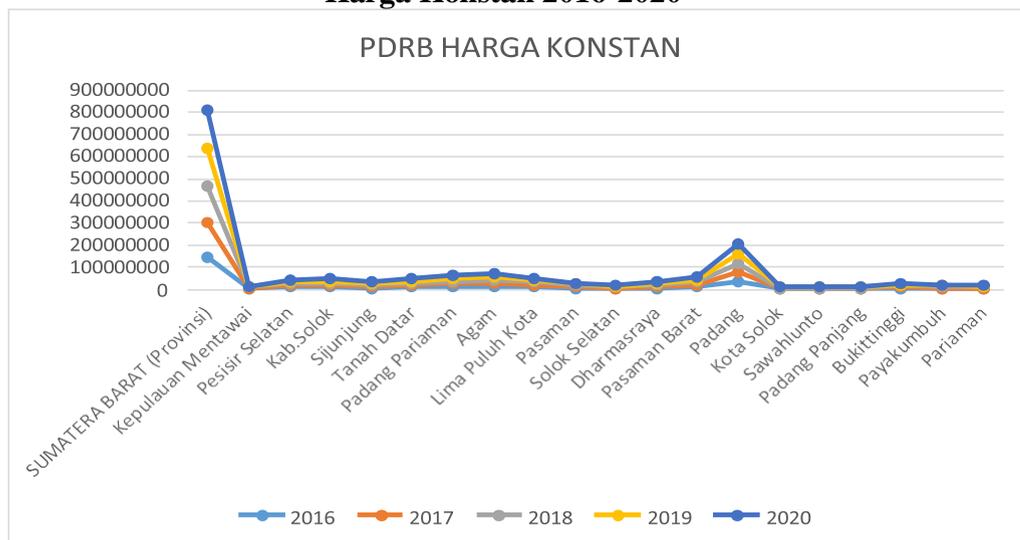
Berdasarkan data indeks gini mengenai Indeks Gini di Provinsi Sumatera Barat. Indeks gini didefinisikan sebagai pengukuran atas ketimpangan sesuatu yang berbentuk angka, indeks gini berkisar dari 0 hingga 1 yang artinya bila ketimpangan berada di angka diatas satu artinya ketimpangan di daerah tersebut tergolong sangat tinggi. Indeks gini ini bisa dilihat dari Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat.

Berdasarkan datagrafik berikut ini data nilai produk domestik bruto di Provinsi Sumatera Barat pada 5 tahun terakhir yang di gunakan untuk mengitung bagaimana keadaan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016-2020. Nilai PDRB di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 karena adanya Covid-19. Dengan adanya peningkatan nilai PDRB tersebut menjadi tanda bahwa masyarakat yang ada di wilayah tersebut mengalami peningkatan taraf hidupnya yang akhirnya mengakibatkan adanya peningkatan nilai PDRB.

Tabel 1.2

PDRB di Provinsi Sumatera Barat menurut Kabupaten/ Kota Atas

Harga Konstan 2016-2020



(Sumber : BPS Sumatera Barat)

Produk Domestik Bruto atau biasa di sebut dengan PDRB ialah jumlah total dari produksi barang dan jasa yang di produksi oleh daerah/wilayah tertentu dengan kurun waktu satu tahun. Artinya, ketika nilai PDRB mengalami peningkatan maka hal tersebut karena adanya peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang di

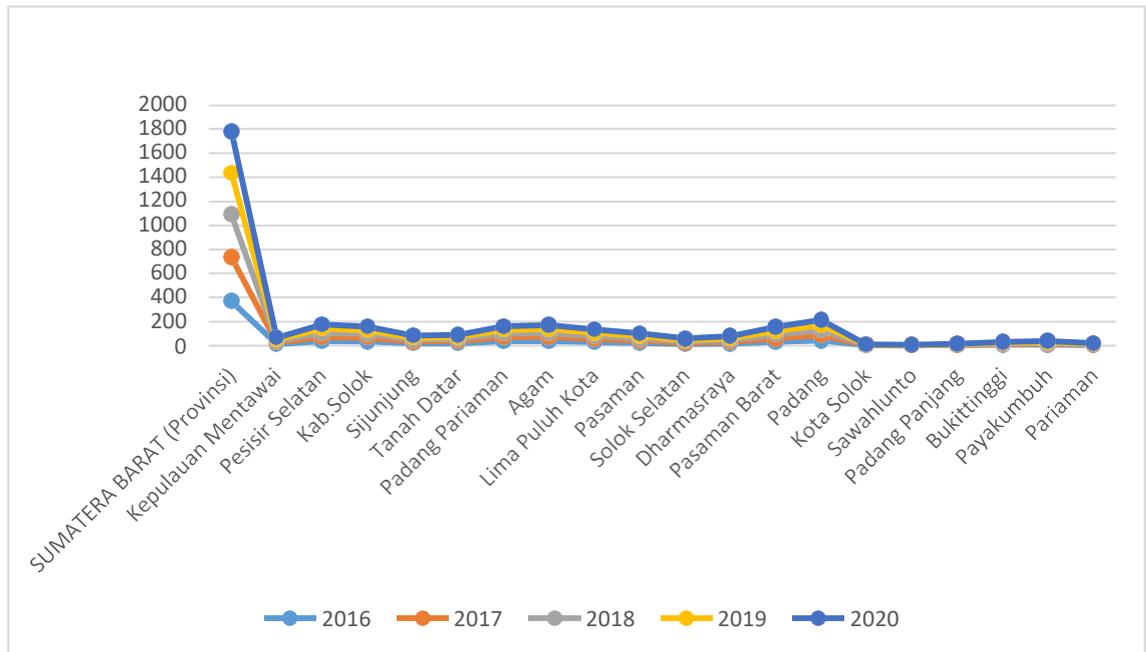
banyak terdapat di Kota Padang dengan jumlah penduduk 950871 jiwa, pada tahun 2020 jumlah penduduk yang paling banyak terdapat di Kota Padang dengan jumlah penduduk 909040 jiwa.

Sedangkan untuk jumlah penduduk yang paling sedikit pada tahun 2016 terdapat di Kota Padang Panjang dengan jumlah penduduk 51712 jiwa, pada tahun 2017 terdapat di Kota Padang Panjang dengan jumlah penduduk 52422 jiwa, pada tahun 2018 terdapat di Kota Padang Panjang dengan jumlah 52994 jiwa, pada tahun 2019 jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kota Padang Panjang dengan jumlah 53693 jiwa, dan yang terakhir untuk jumlah penduduk pada tahun 2020 yang paling sedikit juga terdapat di Kota Padang Panjang dengan jumlah penduduk 56311 jiwa.

Banyak atau sedikitnya jumlah penduduk di suatu daerah juga akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator dari kondisi demografi suatu daerah yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu daerah ((Matondang, 2018)).

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten / Kota di Sumatera Barat



(Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat)

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin berdasarkan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak terdapat di Kota Padang dengan jumlah 42.56 juta jiwa, pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin terdapat di Kota Padang dengan jumlah 43.75 juta jiwa, pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin berdasarkan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat yang paling banyak terdapat di Kota Padang dengan jumlah 44.04 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2019 yang paling banyak jumlah penduduk miskin terdapat di Kota Padang dengan jumlah 42.44 juta jiwa, dan yang terakhir pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin terdapat di Kota Padang.

Sementara untuk presentase jumlah penduduk miskin yang paling sedikit, pada tahun 2016 terdapat di Kota Sawahlunto dengan jumlah 1.34 juta jiwa, pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin yang paling sedikit terdapat di Kota Sawahlunto dengan jumlah 1.23 juta jiwa, pada tahun 2018 terdapat di Kota Sawahlunto dengan jumlah 1.48 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin terdapat di Kota Sawahlunto, dan yang terakhir untuk presentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 terdapat di Kota Sawahlunto dengan jumlah 1.36 juta jiwa. Untuk presentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat sendiri, pada tahun 2018 berjumlah 357.13 juta jiwa, sedangkan untuk jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 berjumlah 348.22 juta jiwa, dan yang terakhir untuk jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 berjumlah 344.23 juta jiwa.

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 yang paling banyak terdapat pada tahun 2016 dengan jumlah 371.55 juta jiwa, dan untuk yang paling sedikit terdapat pada tahun 2020 dengan jumlah 344.23 juta jiwa. Dan dari perhitungan jumlah penduduk miskin berdasarkan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat sendiri dari tahun 2016-2020 Kabupaten / Kota yang paling banyak penduduk miskin terdapat di Kota Padang, sedangkan jumlah penduduk miskin yang paling sedikit berdasarkan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat sendiri dari tahun 2016-2020 terdapat di Kota Sawahlunto.

Dengan adanya perbedaan pendapatan antara individu satu dengan individu yang lainnya pasti akan memunculkan banyak masalah – masalah baru yang nantinya

akan menghambat pembangunan ekonomi di suatu daerah atau di suatu negara, salah satu masalah tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu akibat dari adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk di suatu daerah. Kemiskinan merupakan keadaan dimana suatu keluarga atau individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya dikarenakan ada beberapa faktor seperti pendapatan yang diterimanya kecil atau karena tidak mempunyai pekerjaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penelitian ini berjudul “ Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Barat “

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka didapatkan rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat ?
3. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk

terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat ?

3. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi pemerintah, sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan mengenai pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan. Dan penelitian ini juga diharapkan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat mengatasi permasalahan-permasalahan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan.
2. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sebagai salah satu referensi untuk penelitian yang sejenis serupa dimasa yang akan datang.
3. Bagi penulis sendiri, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta

